



Judul : Percepat realisasi APBN 2021
Tanggal : Kamis, 18 November 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021

Percepat Realisasi APBN 2021

Jokowi meminta para menteri bidang ekonomi untuk serius mengawal komitmen investasi yang telah ditawarkan kepada pelaku usaha asing.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh kementerian/lembaga mempercepat serapan APBN 2021. Menurut Jokowi, saat ini realisasi berbagai anggaran masih belum maksimal.

Sebagai contoh, penyaluran dana perlindungan sosial baru mencapai 77%. Realisasi program padat karya baru sebesar 67% dan dukungan untuk UMKM dan korporasi 60%. "Ini sudah November, masuk ke Desember. Percepat realisasi APBN dan APBD. Seluruh kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Ia juga secara khusus menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah mempercepat serapan APBD. "Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi," tegas Presiden.

Instruksi lainnya ialah kepada para menteri bidang ekonomi untuk serius mengawal komitmen investasi yang telah ditawarkan pemerintah kepada pelaku usaha asing. "Ini harus dikawal, diikuti, ditindaklanjuti sehingga betul-betul menetas menjadi investasi," ujar Jokowi.

Kepala Negara juga menekankan pentingnya mengarahkan investasi ke sektor ekonomi hijau. "Arahkan investasi untuk menggeser pembangkit batu bara dengan energi baru terbarukan. Pengembangan kendaraan dan baterai listrik serta pembangunan *green industrial park* di Kalimantan Utara harus betul-betul bisa direalisasikan dan dimulai," tandas Jokowi.

Selain itu, Presiden juga menekankan

bahwa APBN 2022 harus menjadi instrumen utama pendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun depan. Seluruh kementerian/lembaga harus bergerak cepat merealisasi anggaran sejak awal 2022. Sejak Januari, program-program di lapangan sudah bisa dieksekusi. Ia juga meminta seluruh jajaran menterinya memangkas belanja-belanja yang tidak perlu.

Terkait pandemi, Presiden menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga negara untuk melakukan pencadangan anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan angka yang ideal ialah 5% dari total anggaran instansi masing-masing.

Anggaran fleksibel

Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut APBN masih memiliki ruang untuk fleksibel di 2022. Hal itu dikehendaki oleh UU No 2 Tahun 2020 dan dukungan politik dari DPR yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah dalam mengelola anggaran di masa krisis.

Pemerintah juga mendapatkan dorongan dari penerimaan pajak yang diproyeksikan bakal naik. Kondisi itu tecermin dari asumsi makro dalam APBN 2022 yang menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5%.

Belum lagi, imbuh Yusuf, pemerintah telah memiliki Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dinilai akan mengerek penerimaan pajak.

Hal ketiga yang menjadi alasan tersedianya ruang fleksibilitas APBN 2022 ialah adanya SKB III antara Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. SKB tersebut membuat pemerintah bisa tetap mendorong beberapa pos belanja terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Saat dihubungi, Kepala Kajian Makroekonomi dan Ekonomi Politik LPEM FEB UI Jahan Fachrul Rezki menuturkan, kendati pemerintah berulang kali menyatakan melakukan konsolidasi fiskal, hal itu tak bisa dilakukan terburu-buru. "Dibutuhkan kebijakan *forward guidance* dan sosialisasi *timeline* kebijakan yang akan diambil sehingga masyarakat dan pelaku ekonomi bisa mengantisipasi," ujarnya. (Mir/X-11)